



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HUKUM DAN HAM
Jalan H.R. Rasuna Said Kavling 4-5, Kuningan, Jakarta Selatan, 12940
Telepon 021 (2525015), Faksimili 021 (2526438)
Laman : www.balitbangham.go.id

Nomor : PPH-UM.01.01-1220 4 Oktober 2019
Lampiran : 3 (tiga) eksemplar
Hal : Penyampaian Petunjuk Pelaksanaan
Survei Mandiri Berbasis Elektronik dan *QR Code*

Yth. Para Pimpinan Tinggi Madya
di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM

Dalam rangka pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) serta peningkatan kualitas pelayanan publik Kementerian Hukum dan HAM, Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM akan menyelenggarakan Survei Mandiri IKM-IPK serta Survei Integritas terhadap Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM berbasis elektronik.

Berkaitan dengan hal tersebut, bersama ini dengan hormat kami mengharapkan bantuan dan kerja sama Bapak/Ibu untuk melaksanakan Survei Mandiri IKM-IPK serta Survei Integritas dengan menggunakan *QR Code* sebagaimana petunjuk pelaksanaan dan *QR Code* terlampir. Adapun survei mandiri dilaksanakan selama 1 (satu) bulan mulai tanggal 21 Oktober – 22 November 2019. Hasil survei mandiri akan dijadikan data awal Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM untuk melakukan penilaian terhadap calon satuan kerja WBK/WBBM yang akan dilaksanakan pada minggu ketiga bulan Maret 2020.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami haturkan terima kasih.



Kepala Badan
Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM,

Asep Kurnia
NIP 196611191988031001



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HUKUM DAN HAM
Jalan HR. Rasuna Said Kav 4-5 Kuningan, Jakarta Selatan 12920
Telepon (021) 2525015, Faksimili (021) 2526438
Laman: <http://www.balitbangham.go.id>

PETUNJUK PELAKSANAAN
NOMOR : PPH – UM.01.01-217

BAB I
PENDAHULUAN

1. Latar Belakang
Untuk melakukan penilaian pendahuluan terhadap kualitas pelayanan publik dan persepsi anti korupsi dalam rangka pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) serta evaluasi internal, maka dilakukan survei mandiri berbasis elektronik untuk mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Persepsi Korupsi (IKM-IPK) serta survei Integritas terhadap Satuan Kerja (Satker) di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.
2. Maksud dan Tujuan
Sebagai petunjuk teknis dalam pelaksanaan survei mandiri berbasis elektronik guna menghasilkan data yang cepat, akurat, efektif, akuntabel, dan *real time* dalam menilai kualitas tata kelola institusi dalam memberikan pelayanan publik. Selain itu juga digunakan sebagai dasar pemetaan terhadap Satker yang akan diusulkan meraih predikat WBK/WBBM.
3. Ruang Lingkup
Seluruh Satker di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan pelaksanaan survei.
4. Pengertian
Survei mandiri berbasis elektronik adalah survei yang secara langsung tersambung ke dalam jaringan komputer. Pelaksanaan survei mandiri berbasis elektronik berbeda dengan pelaksanaan survei secara manual sehingga diperlukan petunjuk pelaksanaan ini.

BAB II
PELAKSANAAN

1. Tata cara Survei IKM-IPK:
 - a. QR Code survei IKM-IPK yang telah didistribusikan wajib dipasang di ruang layanan dan/atau ruang tunggu yang letaknya strategis (dapat diakses oleh seluruh penerima layanan).
 - b. QR Code dapat dikirimkan melalui surat elektronik (*e-mail*) kepada penerima layanan yang tidak memerlukan kehadiran fisik di tempat pelayanan (notaris, pemohon hak cipta dan pengguna layanan lainnya).
 - c. Pindai QR Code menggunakan telepon seluler (Android ataupun iOS). Untuk telepon seluler yang tidak mendukung untuk memindai QR Code secara langsung dapat mengunduh aplikasi *scanner QR Code* di *playstore*, *appstore* atau sejenisnya.
 - d. Setelah memindai QR Code maka akan keluar laman survei dan pilihan jawaban dapat langsung diisi sesuai dengan pilihan masing-masing.
 - e. Terdapat 15 (lima belas) pertanyaan untuk survei IKM-IPK. Pertanyaan didahului dengan jenis layanan yang diterima. Apabila telah selesai menjawab, selanjutnya tekan tombol "Kirim" hingga muncul keterangan "Sukses".

Tata Cara...

2. Tata cara Survei Integritas:

- a. QR Code survei integritas yang telah didistribusikan wajib dipasang di ruang kerja yang letaknya strategis (dapat diakses oleh seluruh pegawai).
- b. Pindai QR Code menggunakan telepon seluler (Android ataupun iOS). Untuk telepon seluler yang tidak mendukung untuk memindai QR Code secara langsung dapat mengunduh aplikasi *scanner QR Code* di *playstore*, *appstore* atau sejenisnya.
- c. Setelah memindai QR Code maka akan keluar laman survei dan dapat langsung diisi dan pilihan jawaban yang sesuai dengan pilihan masing-masing.
- d. Terdapat 22 (dua puluh dua) pertanyaan untuk Survei Integritas. Pertanyaan didahului dengan identitas diri. Apabila telah selesai menjawab, selanjutnya tekan tombol "Kirim" hingga muncul keterangan "Sukses".

3. Responden

- a. Responden IKM-IPK Unit Eselon I :
Pengguna Layanan Unit Eselon I
- b. Responden IKM-IPK Kantor Wilayah :
 - 1) Pegawai UPT : Imigrasi, Pemasarakatan, BHP, dan BADIKLAT.
 - 2) Notaris, Konsultan KI, Pegawai Biro/Bagian Hukum Pemerintah Prov/Kab/Kota, dan Pemohon Layanan Hukum lainnya.
- c. Responden IKM-IPK UPT Imigrasi :
Pengguna Layanan Keimigrasian.
- d. Responden IKM-IPK UPT Pemasarakatan :
Pengguna Layanan Pemasarakatan.
- e. Responden IKM-IPK BHP :
Pengguna Layanan BHP.
- f. Responden IKM-IPK BADIKLAT/POLTEKIM/POLTEKIP :
Peserta Diklat.
- g. Responden Integritas Internal Organisasi :
Seluruh Pegawai di masing-masing Kantor Wilayah, UPT Imigrasi, UPT Pemasarakatan, BHP, dan BADIKLAT/POLTEKIM/POLTEKIP.

4. Jadwal Pelaksanaan

Survei mandiri berbasis elektronik dilaksanakan selama 1 bulan sejak tanggal 21 Oktober s/d 22 November 2019.

5. Lain-lain

- a. Pengunjung melakukan pindai QR Code setelah selesai menerima layanan.
- b. QR Code dapat diperbanyak (fotokopi, *banner*, *leaflet*, dll).
- c. QR Code dan Petunjuk Pelaksanaan Survei dalam bentuk PDF akan dikirimkan melalui Sisumaker.

Jakarta, 4 Oktober 2019
Kepala Badan
Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM,



ASEP KURNIA
NIP 196611191986031001

SURVEI INTEGRITAS INTERNAL ORGANISASI SEKRETARIAT JENDERAL



Survei dilaksanakan oleh :

BALITBANGKUMHAM
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA



SURVEI INTEGRITAS INTERNAL ORGANISASI INSPEKTORAT JENDERAL



Survei dilaksanakan oleh :

BALITBANGKUMHAM
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA



SURVEI INTEGRITAS INTERNAL ORGANISASI

DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN



Survei dilaksanakan oleh :
BALITBANGKUMHAM
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA



SURVEI INTEGRITAS INTERNAL ORGANISASI

DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM



Survei dilaksanakan oleh :
BALITBANGKUMHAM
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA



SURVEI INTEGRITAS INTERNAL ORGANISASI

DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL



Survei dilaksanakan oleh :
BALITBANGKUMHAM
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA



SURVEI INTEGRITAS INTERNAL ORGANISASI

DIRKETORAT JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN



Survei dilaksanakan oleh :
BALITBANGKUMHAM
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA



SURVEI INTEGRITAS INTERNAL ORGANISASI

DIREKTORAT JENDERAL HAK ASASI MANUSIA



Survei dilaksanakan oleh :
BALITBANGKUMHAM
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA



SURVEI INTEGRITAS INTERNAL ORGANISASI

BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL



Survei dilaksanakan oleh :
BALITBANGKUMHAM
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA



SURVEI INTEGRITAS INTERNAL ORGANISASI

**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**



Survei dilaksanakan oleh :
BALITBANGKUMHAM
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA



SURVEI INTEGRITAS INTERNAL ORGANISASI

**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**



Survei dilaksanakan oleh :
BALITBANGKUMHAM
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA



SURVEI KEBUTUHAN KONSUMEN

SEKRETARIAT JENDERAL



Survei dilaksanakan oleh :

BALITBANGKUMHAM

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA



SURVEI KEBUTUHAN KONSUMEN

INSPEKTORAT JENDERAL



Survei dilaksanakan oleh :
BALITBANGKUMHAM
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA



SURVEI KEBUTUHAN KONSUMEN

DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI



Survei dilaksanakan oleh :
BALITBANGKUMHAM
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA



SURVEI KEBUTUHAN KONSUMEN

DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN



Survei dilaksanakan oleh :
BALITBANGKUMHAM
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA



SURVEI KEBUTUHAN KONSUMEN

DIREKTORAT JENDERAL

ADMINISTRASI HUKUM UMUM



Survei dilaksanakan oleh :
BALITBANGKUMHAM
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA



SURVEI KEBUTUHAN KONSUMEN

DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL



Survei dilaksanakan oleh :
BALITBANGKUMHAM
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA



SURVEI KEBUTUHAN KONSUMEN

DIRKETORAT JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN



Survei dilaksanakan oleh :
BALITBANGKUMHAM
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA



SURVEI KEBUTUHAN KONSUMEN

DIREKTORAT JENDERAL HAK ASASI MANUSIA



Survei dilaksanakan oleh :
BALITBANGKUMHAM
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA



SURVEI KEBUTUHAN KONSUMEN

BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL



Survei dilaksanakan oleh :
BALITBANGKUMHAM
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA



Kepercayaan dan validitas | Solusi | Produktif | Objektif | Netral | Sistematis | Integratif | Falsafah

SURVEI KEBUTUHAN KONSUMEN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA



Survei dilaksanakan oleh :
BALITBANGKUMHAM
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA



SURVEI KEBUTUHAN KONSUMEN

**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**



Survei dilaksanakan oleh :
BALITBANGKUMHAM
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

